



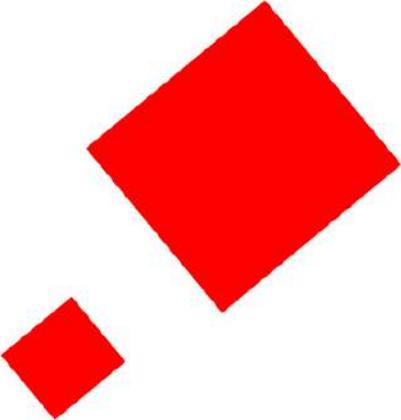
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

2022

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KANTOR WILAYAH
PAPUA**

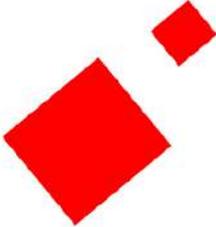




"Tunjukkan Kinerja Kanwil Papua Semakin **PASTI** dan **BerAKHLAK**"

Antonius M. Ayorbaba, S.H., M.Si

kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM
Papua



**LKjIP
Kanwil Kemenkumham
Papua
2022**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA**

JL. RAYA ABEPURA NO.37 JAYAPURA



(0967) 586147



kanwil.papua@kemenkumham.go.id



<https://papua.kemenkumham.go.id>



DAFTAR ISI

03

DAFTAR ISI

04

DAFTAR GAMBAR

05

DAFTAR TABEL

06

DAFTAR GRAFIK

08

KATA PENGANTAR

10

IKHTISAR EKSKLUSIF

11

BAB I - PENDAHULUAN

24

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

58

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

77

BAB IV - PENUTUP

79

LAMPIRAN



SEMAKIN PASTI

DAFTAR GAMBAR

13

PROFIL KANWIL

16

STRUKTUR ORGANISASI

71

CAPAIAN KINERJA



DAFTAR TABEL

30

TB. RENCANA STRATEGIS

37

TB. PERJANJIAN KINERJA

58

TB. CAPAIAN KINERJA

69

TB. REALISASI ANGGARAN

72

TB. TARGET KINERJA

75

TB. E-MONEV



DAFTAR GRAFIK

14

PROFIL KANTOR

76

HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI



KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA



Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah dan Kasih Sayangnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2022 ini telah tersusun dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2022 ini merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis yang tercantum didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini disajikan sebagai bentuk tekad dan janji kinerja tahunan yang dicapai selama tahun anggaran 2022. Dalam laporan ini dipaparkan mengenai perencanaan kinerja tahun 2022 disertai target-targetnya, realisasi dengan output yang diharapkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Kantor Wilayah kepada Menteri Hukum dan HAM dan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Serta wujud dari komitmen Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi dan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas



sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara pemerintah menetapkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bore.bsn.go.id/verifikasi>

Pemerintah (SAKIP) yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan kini menjadi Laporan Kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua diharapkan menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dan tersusunnya laporan ini kedepannya sebagai bahan perbaikan yang berkesinambungan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka pendek dan menengah.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas kontribusinya dalam pencapaian kinerja tahun 2022 dengan memegang teguh nilai Kami PASTI TIFA (Transformasi, Improvmen, Fisibilitas dan Akuntabel).

Kepala Kantor Wilayah



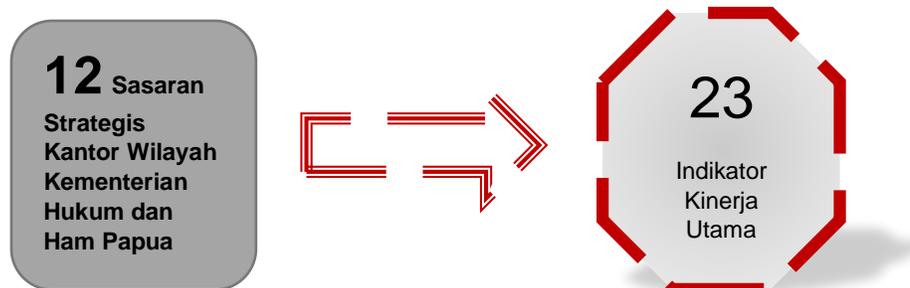
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H, M.Si
NIP. 19710515 199610 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

“ Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk tanggungjawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMN tahun 2020 – 2024 ”



Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, merupakan wujud organisasi yang profesional, efektif dan efisiensi serta diharapkan telah memenuhi sasaran strategis dengan indikator utama serta target pada Perjanjian Kinerja yang telah di sepakati bersama para Kepala Divisi dengan Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Tekni di lingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.



Dua belas (12) sasaran startegis dan 23 indikator kinerja utama ini terdapat di dalam masing – masing perjanjian kinerja tahun anggaran 2022 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.



Kementerian Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Papua

SEMAKIN

PASTI TIFA

Nilai **SMART**
93,26 %

Nilai **IKPA**
93,25 %

REALISASI ANGGARAN
95,01 %

PAGU : Rp 172.983.422.000
REALISASI : Rp 164.344.685.417

2022



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi
- C. Permasalahan/Tantangan
- D. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki 29 Satuan Kerja yang terdiri dari 9 Unit Eselon I pada Kantor Wilayah dan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 15 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian, diantaranya yaitu Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Keimigrasian, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), Ditjen Peraturan Perundang – Undangan (PP), Dukungan Manajemen (SEKJEN), Ditjen HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANGKUMHAM), Bapas Kelas II Jayapura, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui, Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tanah Merah, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura, Rupbasan Kelas I Jayapura, Balai Pemasyarakatan Keerom, Balai Pemasyarakatan Kelas II



Merauke, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dan RUDENIM Jayapura. Dengan wilayah kerja terdapat pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota, sebagaimana tergambar pada profil berikut :



Wilayah Kerja

Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Papua

Jumlah SDM

KANWIL : 140 | PAS : 851
| IMIGRASI : 315

Jumlah UPT

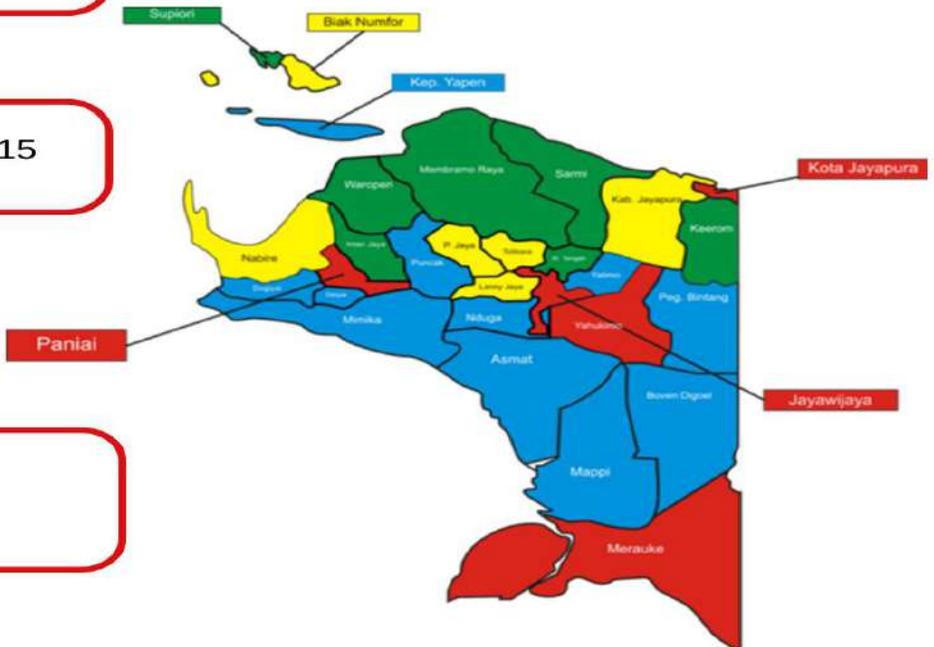
PEMASYARAKATAN : 15
| IMIGRASI : 5

WBP

NAPI TAHANAN
2.204 740
TOTAL 2.944

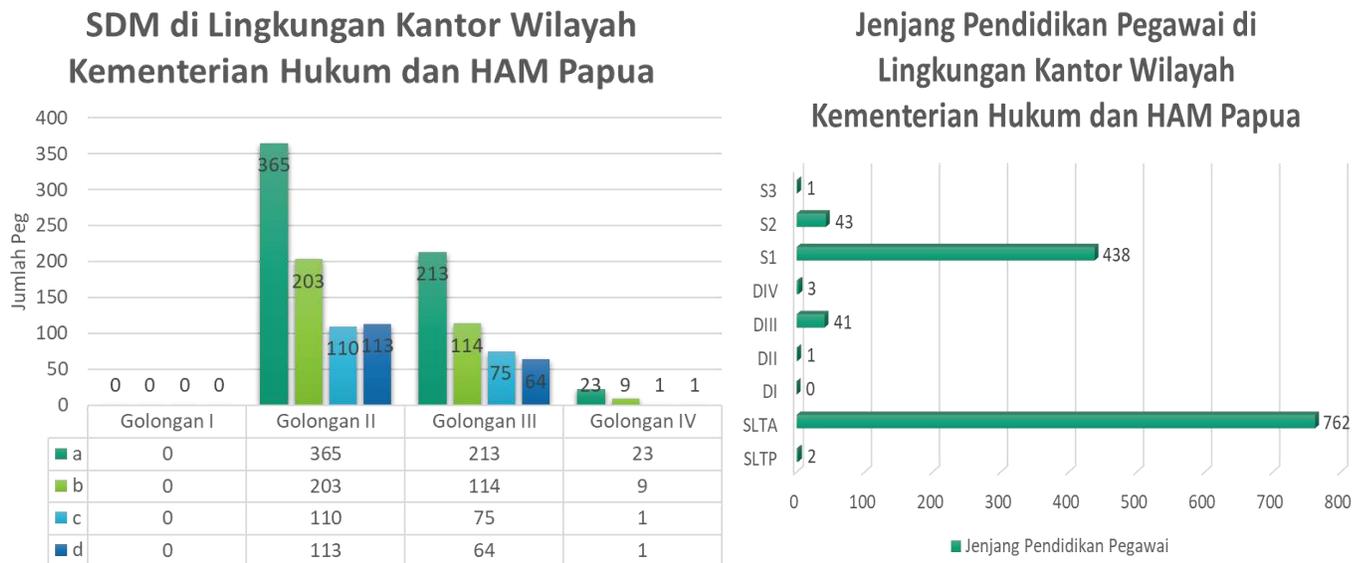
WBP WNA

ORANG ASING
TOTAL
1.712



Gambar 1.1. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Jumlah ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak 1.291 Orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat dari garfik berikut :



Grafik 1.1. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala,
- (3) Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Pasal 2

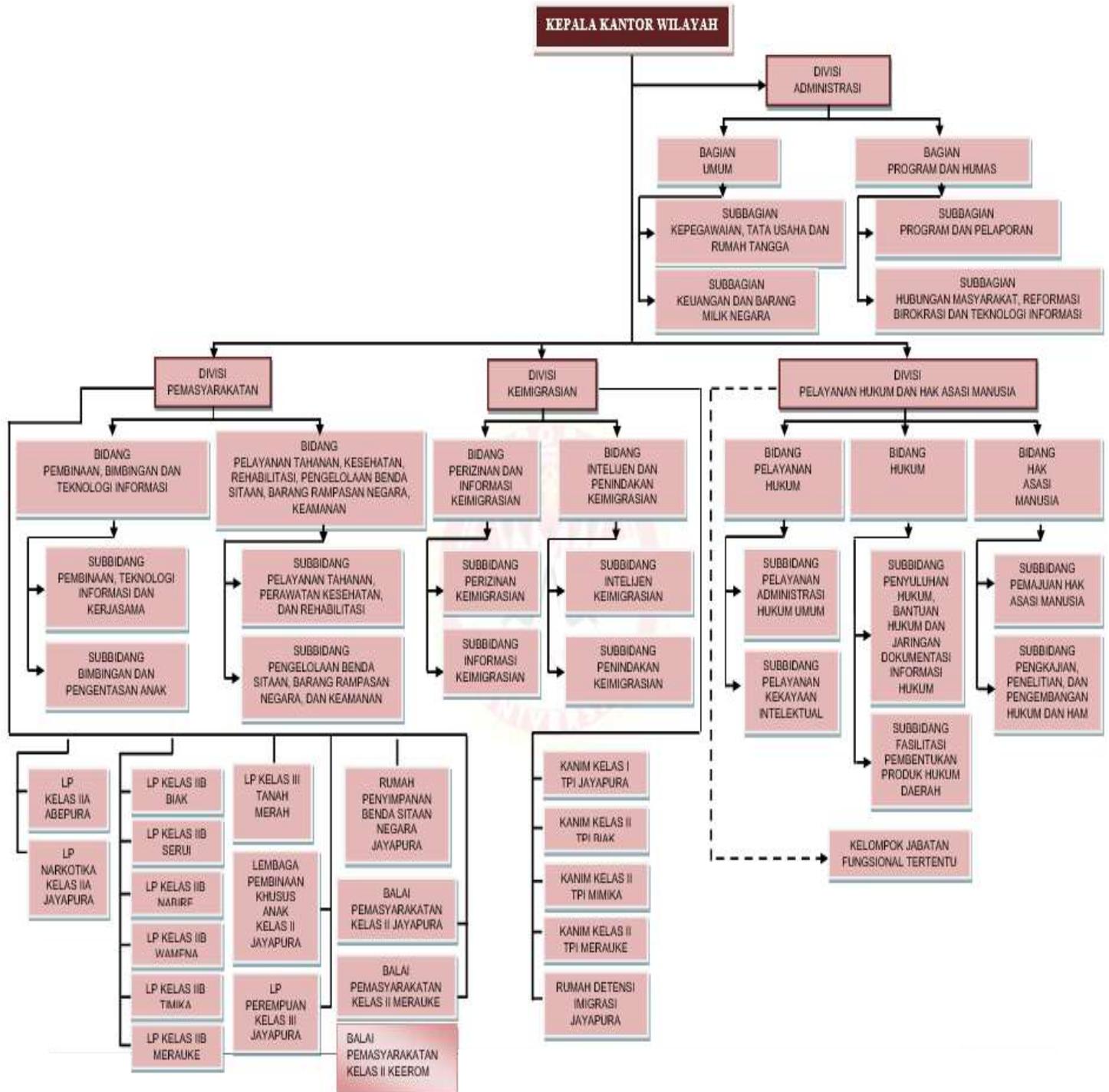
Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- (3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- (4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis dilingkungan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- (5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, penegakan hak asasi manusia; dan
- (6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.





Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dalam pelaksanaan tugas fungsi mempunyai peran strategis yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia di tanah Papua. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Visi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dan berikut adalah tugas pokok dan fungsi setiap Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua :

(a) Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;

(b) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah;

1. Administrasi Hukum Umum

Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis;

2. Kekayaan Intelektual

Program Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal lainnya;

3. Program Pembentukan Hukum

- Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap proses penyusunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. Di tingkat wilayah peran strategis tersebut diemban oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan dalam tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus fungsi pelayanan hukum. Fungsi-Fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum;
 5. Program Pemajuan HAM
Program Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang :
Diseminasi HAM, Penguatan Hak Asasi Manusia, Informasi Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia
 6. Program Balitbangkumham
Program Balitbangkumham mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan

informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

(c) Divisi Pemasyarakatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi social terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hidup, kehiduan dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Bagi seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau disebut Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pada proses peradilan, benda sitaan dan barang rampasan Negara sebagai aset tindak pidana ditempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan).

(d) Divisi Keimigrasian

Menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia serta pengawasan Keimigrasian, merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada khususnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2019 dibuat sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mana menyajikan pertanggungjawaban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024).

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. ASPEK STRATEGIS



Sebagaimana pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan hak asasi manusia ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak

bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berperan serta mendukung Pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan hukum, agar selaras, terarah dan terkendali dengan tetap berpegang pada tata nilai PASTI TIFA.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua selama tahun 2022, terdapat isu atau permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja :

1. Terjadi kesalahan dalam pengiriman data sejumlah pegawai yang naik pangkat pada email yang sudah tidak aktif yang menyebabkan sekitar 27 orang pegawai tidak bisa naik pangkat;
1. Kapasitas bandwidth kurang memadai untuk menunjang kebutuhan jaringan internet sehingga sering terjadi gangguan internet yang menyebabkan kinerja terhambat;
2. Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja pada beberapa bagian/bidang belum memadai dan memenuhi kebutuhan pegawai;
3. Penatausahaan BMN pada Kantor Wilayah mengalami keterlambatan atau terhambat dikarenakan barang hilang dan ada beberapa aset yang tidak dikembalikan oleh pensiunan dan tidak di akui oleh satuan kerja lain;
4. Penyerapan pada IKPA untuk mencapai target mengalami keterlambatan dikarenakan kurang perencanaan dari penanggungjawab kegiatan, keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan dan pada halaman III DIPA mengalami ketidaksesuaian dengan rencana dan penarikan atau realisasi perbulannya;
5. Pengelolaan Barang dan Jasa (BARJAS) belum memiliki SOP sehingga dalam proses administrasi tidak tertib;
6. Tidak bisa mengakses website survei pelayanan imigrasi sehingga divisi imigrasi masih koordinasi dengan pusat untuk mengetahui indeks kepuasan pelayanan keimigrasian;
7. Keterbatasan anggaran pada Ditjen HAM dan BALITBANGKUHAM untuk menunjang pencapaian kinerja tidak maksimal dikarenakan letak geografis pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua yang aksesnya harus menggunakan pesawat terbang sehingga tidak dapat melakukan koordinasi terkait program kerja;

8. SARPRAS yang tidak menunjang dan kekurangan SDM yang belum mempunyai kemampuan dalam membantu bekerja di Sub Bidang Ditjen HAM dan BALITBANGKUMHAM;
9. Keterlambatan data dukung dari satuan kerja pemasyarakatan sehingga data pada laporan tidak terbaru dan kekurangan SDM yang mampu mengolah teknologi informasi.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 serta upaya / strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023.



SEMAMBAH PASTI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Tata Nilai
- E. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Sasaran
- F. Kebijakan / Strategi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 – 2024 adalah:

**”KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRASI DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : ”
INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

- a) Membentuk peraturan perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- c) Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;



- e) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Masyarakat;
- f) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

3. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- a) Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- b) Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- c) Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- d) Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

4. TUJUAN

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentunya selaras dengan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- c) Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- d) Terlindunginya hak asasi manusia;
- e) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

- f) Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- g) Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. SASARAN STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam membantu mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM maka telah disusun indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai selama tahun anggaran 2022 untuk menjadikan manajemen pemerintah efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, adalah sebagai berikut :

- a) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi, efektif dan efisien;
- b) Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- c) Ikut serta berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- d) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang efektif dan efisien;
- e) Terpenuhinya peraturan pengundangan – undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan;
- f) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- h) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

6. KEBIJAKAN / STRATEGI



Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentunya selaras dengan kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM, strateginya ini disusun untuk menyukseskan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat dijelaskan pada tabel berikut :



KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Administratif Fasilitatif		
Meningkatkan kualitas program dan penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan supervisi penyusunan anggaran, dengan berpatokan pada kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku2. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Satuan Kerja mengenai program dan penganggaran3. Meningkatkan kualitas SDM Operator SAKTI pada seluruh Satuan Kerja.	Meningkatnya kualitas penganggaran yang akurat, kredibel dan akuntabel
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan monitoring pada satuan kerja terkait sarana dan prasarana penunjukan peningkatan tugas dan fungsi2. Membuat usulan penambahan anggaran untuk renovasi, maupun pembangunan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua3. Menginventarisir sarana dan prasana kebutuhan Kantor Wilayah serta Satuan Kerja	Tersusunnya usulan Grand Design Tahun 2020-2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Peningkatan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Tugas dan Fungsi Humas untuk pelayanan dan publikasi informasi kepada Masyarakat2. Membuat program one day one news.3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi external4. Membangun sinergi dan kerjasama	Tersampainya layanan informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua kepada Masyarakat



	<p>bersama wartawan lokal/nasional di wilayah Papua</p> <ol style="list-style-type: none">5. Terlibat dalam Badan Koordinasi Humas Provinsi Papua.6. Terus mendorong ASN Kanwil Papua baik di wilayah Jayapura maupun Kabupaten UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian terus mendukung dan membagikan pemberitaan di Akun Media Sosial Resmi Kanwil Kemenkumham Papua7. Memberikan reward kepada UPT yang gencar mempublikasikan kegiatannya di UPT sebagai upaya peningkatan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua8. Mengadakan pelatihan tenaga kehumasan.	
Meningkatkan Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua meraih WBK dan WBBM	<ol style="list-style-type: none">1. meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui optimalisasi E-RB.2. Membentuk agen perubahan sebagai role model, serta melaksanakan 6 (enam) area perubahan sebagai faktor pengungkit.3. Pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM4. Melakukan kordinasi dengan instansi external serta stake holder lain.5. Melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja.	Bertambahnya Satuan Kerja Peraih WBK dan WBBM
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan	Meningkatnya pengawasan intern



<p>yang baik melalui Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p>	<p>kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p> <ol style="list-style-type: none">2. meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif3. melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP4. Melakukan koordinasi dengan BPKP terkait petunjuk dan pelaksanaan SPIP5. Meningkatkan SDM operator SPIP pada Satuan Kerja dengan mengusulkan diadakannya diklat SPIP secara klasikal maupun virtual kepada BPSDM.	<p>pemerintah pada Satuan Kerja</p>
<p>Peningkatan pelayanan kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat proses layanan kepegawaian diantaranya Kenaikan Pangkat, KGB, Pengusulan Kenaikan Pangkat2. pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua3. Meningkatkan pemahaman pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian terkait pengisian Jurnal Harian dan SIMPEG melalui sosialisasi, monitoring dan juga pemberlakuan pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja4. Sosialisasi dan pendampingan	<p>Meningkatnya layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p>



	tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Divisi Pemasyarakatan		
Peningkatan Citra Positif Divisi Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan peran SatopspatnalPas (Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan)2. Memaksimalkan peran Humas Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya ASN yang berintegritas dan disiplin dalam pelaksanaan tugas2. Terpublikasikannya kegiatan positif Jaringan Pemasyarakatan baik Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan3. Terciptanya penilaian positif masyarakat terhadap pemasyarakatan
Meningkatkan layanan prima pada seluruh Lapas, Bapas dan Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lapas, Bapas, dan Rupbasan untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.2. Melakukan pengusulan pembangunan atau renovasi bangunan untuk Lapas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua3. Melakukan usulan Status Bapas Kelas II Jayapura menjadi Bapas Kelas I Jayapura.4. Meningkatkan mutu layanan kesehatan Lapas dengan berkoordinasi dan	Meningkatnya layanan prima Pemasyarakatan



	<p>kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Optimalisasi teknologi informasi yaitu Sistem Data Base Pemasarakatan untuk meningkatkan layanan bagi narapidana6. Meningkatkan kapasitas SDM SDP pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan7. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan makanan.8. Zero Pungli bagi Narapidana yang akan menjalani CB, PB, CMB, CMK maupun Asimilasi9. Menyediakan sarana penyimpanan benda sitaan maupun benda rampasan yang layak10. Meningkatkan SDM Pembimbing Pemasarakatan11. Meningkatkan peran Pos Bapas.	
<p>Mewujudkan warga binaan pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya dan meningkatkan jaminan perlindungan hak asasi tahanan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Mengatasi overcrowding/over populasi pada Lapas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui pengusulan perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana Pemasarakatan.2. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemsarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan.3. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemsarakatan4. Pendidikan penyelenggaraan kejar paket5. Pembinaan mental dan rohani warga	



	<p>binaan pemasyarakatan melalui kegiatan keagamaan maupun olahraga</p> <p>6. Melakukan pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.</p> <p>7. Wajib belajar 12 tahun bagi narapidana anak.</p>	
Divisi Keimigrasian		
<p>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Papua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan standarisasi kualitas pelayanan keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua; 2. Pelatihan pegawai di Unit Pelaksana Teknis terkait pelayanan masyarakat dan hubungan masyarakat; 3. Penyediaan fasilitas pendukung layanan yang tepat guna dan layak guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua; 2. Berkurangnya laporan pengaduan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua.
<p>Pencapaian target PNBPN dan pengelolaan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat terkait layanan-layanan keimigrasian; 2. Peningkatan layanan jemput bola kepada masyarakat melalui program eazy passport serta layanan percepatan 1 (satu) hari jadi; 3. Perluasan layanan penerbitan <i>electronic passport</i> pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua 4. Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan keuangan bagi pejabat/ pegawai terkait di semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya target penerimaan PNBPN pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua; 2. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) pada semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua; 3. Meningkatnya nilai penyerapan anggaran



		pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.
Penguatan Fungsi Keimigrasian pada Pengawasan dan Pengamanan di Perbatasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan fasilitas pendukung dan penambahan jumlah petugas di Imigrasi di Pos Lintas Batas dan wilayah perbatasan;2. Penguatan dan perluasan fungsi/ penggunaan aplikasi <i>Border Control Management</i> pada Pos Lintas Batas Tradisional/ Internasional Wilayah Papua;3. Peningkatan sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi Laporan Harian Intelijen (LHI) oleh semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua;4. Peningkatan kerjasama dan revitalisasi jaringan intelijen dengan instansi terkait di wilayah perbatasan negara;5. Peningkatan jumlah operasi mandiri/ gabungan Pengawasan Orang Asing (PORA) di wilayah Papua.	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya infrastruktur fisik dan BCM pada Pos Lintas Batas di wilayah Papua;2. Bertambahnya jumlah pegawai yang ditempatkan di Pos Lintas Batas;3. Meningkatnya jumlah data/ informasi pada aplikasi LHI dari Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua4. Meningkatnya jumlah pelaksanaan kegiatan/ operasi PORA pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.
Pendukung dan fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pelayanan keimigrasian bagi WNA, khususnya bagi investor dan pelaku usaha yang akan mengembangkan usahanya di wilayah Papua;2. Pemberlakuan standarisasi pelayanan menuju <i>zero complaint</i> dalam layanan keimigrasian;3. Pelaksanaan fungsi intelijen dan penegakan hukum terhadap WNA yang	<ol style="list-style-type: none">1. Bertambahnya keberadaan WNA yang bermanfaat bagi ekonomi/ kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua2. Meningkatnya jumlah PNPB layanan WNA pada masing-



	berpotensi merugikan ekonomi/kesejahteraan masyarakat.	masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.
Peningkatan keberadaan, eksistensi dan citra positif keimigrasian di Wilayah Papua.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan diseminasi kegiatan dan capaian yang diperoleh oleh Divisi Keimigrasian dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua; • Peningkatan keberadaan dan eksistensi Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian pada media-media sosial yang populer di masyarakat; • Peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan instansi pemerintah dan/atau lembaga sosial masyarakat di wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian; • Pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang ramah dan memuaskan kepada masyarakat pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah postingan/berita positif terkait Imigrasi di wilayah Papua; • Meningkatnya citra keimigrasian di masyarakat wilayah provinsi Papua.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM		
Peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem aplikasi AHU online di daerah 2. Penguatan layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan AHU di daerah 3. Penguatan penyebaran informasi terkait pelayanan AHU di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifnya pemakaian AHU online di daerah 2. Peningkatan kualitas dalam pelayanan pengaduan dan konsultaso terkait layanan AHU 3. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait layanan AHU di



		daerah
Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah	Tercapainya dengan efektif pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah
1. Peningkatan Inventarisasi Kekayaan Komunal 2. Peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah	1. Sosialisasi kekayaan intelektual kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi kekayaan intelektual kepada masyarakat 3. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Universitas dan Pelaku kreatif dalam mendorong peningkatan pendaftaran KI 4. Melaksanakan strategi jemput bola dengan turun langsung ke Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendampingan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal 5. Melaksanakan pendampingan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat	1. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2. Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal dan personal di Provinsi Papua dengan diterbitkannya : a. Sertifikat kekayaan intelektual komunal b. Sertifikat merek, paten, dan desain industri c. Surat pencatatan ciptaan.
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	1. Mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi 2. Menyediakan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah	Proses peminjaman Buku (Smart Library)
Bantuan Hukum	1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada	Meningkatnya penambahan



	masyarakat 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi terhadap dana penyelenggaraan program Bantuan Hukum di daerah	organisasi bantuan hukum di Provinsi Papua
Peresmian Desa Sadar Hukum	Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat terhadap hukum	Bertambahnya Desa Daring Sadar Hukum
1. Meningkatnya Jumlah Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota yang melaporkan Aksi HAM 2. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyampaikan kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Provinsi Kabupaten dan Kota	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Papua
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat	1. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 2. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun 3. Melakukan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.	



A. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memperoleh anggaran sebesar Rp **172,983,422,000,- (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)** dengan pengalokasian melalui perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(Rp)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0	
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0	



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 % 93 %	
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	18,992,934,000

2. Divisi Pemasarakatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2	1,240,098,000



2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Masyarakat yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%	
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%	
		3. Persentase menurunnya residivis	1%	
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%	
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban Masyarakat UPT	75,0	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80	
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80	



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80	
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53	
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90	
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat	50	
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68	
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70	
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70	
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%	1,240,098,000
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	
		2. persentase narapidana yang	98%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mendapatkan hak remisi		
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	
		3. Persentase klien Anak yang	30%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		terpenuhi hak pendidikannya		
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh	80%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	



3. Divisi Keimigrasian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2	2,356,106,000
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20	
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12	



4. Divisi Yankumham

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	2,356,106,000			
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12				
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2				
			2.		Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
			3.		Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70 %	
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40 %	



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	86 %	
2.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32	
3.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %	
		Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %	
4.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang	



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%	
5.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%	
6.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%	
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	77%	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	79%	



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%	
7.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%	
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	4.063.209.000
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan	82%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	3 Layanan	
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	14 Orang	
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2022
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2022
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dengan kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan menggunakan indikator keberhasilan pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada akhir tahun 2022.

Adapun rumus dalam capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2022}}{\text{Target Capaian Tahun 2022}} \times 100\% = \dots$$

1. DIVISI ADMINISTRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	32	10.32%

ANALISIS

Realisasi capaian sebesar 32 dengan target sebesar 3.1 sehingga capaian 10,32% dari sasaran kerja divisi administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Capaian kinerja ini diperoleh survey yang dilakukan dari bulan ferbuari sampai dengan oktober 2022 dengan responden sebanyak 293 orang. Capaian kinerja ini melebihi target yang telah di tentukan, dan kedepanya diahrapkan akan ditingkatan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	103	128,75
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70	87,5
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	70	87,5
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	80	123,07
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	40,23	41,05
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	49,75	62,18
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	40	50
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	0	0



		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	13,3	47,5
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	30,04	44,83
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	0	0
3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	60	85,71
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	50	83,33
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	24	48
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	186,3	310,5
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	64,9	216,3
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	58,6	78,13
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	132,3	132,3



		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	437,9	547,3
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	228,1	285,1
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	70	87,5
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	60	85,71
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	70	87,5
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	60	85,71
7.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	70	87,5
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	60	85,71
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	70	87,5
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	60	85,71



Realisasi capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dicapai melalui beberapa capaian dengan kegiatan – kegiatan yang terlaksana selama tahun 2022. Yang pertama pengembangan lembaga pemasyarakatan produktif dengan narapidana memperoleh sertifikat pelatihan, peningkatan pelayanan tahanan sesuai standar dapat dilihat dari presentase menurunnya tahanan yang overstaying sebesar 128,75% dari target 80%, presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum sebesar 87,5% dari target 80%, presentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum sebesar 87,5% dari target 80%. Dan meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadi, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi melalui presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan target 65%, capaian sebesar 123,07%, pada presentase narapidana yang mendapat hak remisi tidak mencapai target sebesar 90% dikarenakan realisasi hanya sebesar 40,23 sehingga capaian 41,05%, presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi juga tidak mencapai target 80%, realisasi 49,75 dan capaian 62,18%, presentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tidak mencapai target sebesar 80% dari capaian hanya 50%, presentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin tidak terlaksana sesuai target 15% disebabkan oleh WBP pada seluruh lapas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tidak memiliki kualifikasi tingkat resiko tinggi, capaian kinerja pada presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 47,5%, tetapi presentase narapidana yang bekerja dan produktif tidak mencapai 67% target hanya tercapai 44,83%, jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tidak terlaksana karena kurangnya partisipasi WBP untuk mendaftar pada perguruan tinggi. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar 2 (dua) indikator telah mencapai target namun 1 (satu) indikator tidak mencapai target. Peningkatan pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengetasan Anak di wilayah sesuai standar, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di bidang keamanan dan keterbitan, dan meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar telah mencapai target dengan pelaksanaan kegiatan.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	44.9	14.03
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	37.44	12
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	37.44	12

ANALISIS

Dalam mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah dilakukan survey kepuasan layanan keamanan bagi masyarakat dan internal pada wilayah sehingga capaian kinerja sebesar 44,9 dari target 3,20 maka capaiannya sebesar 14,03% untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah, selanjutnya indeks kepuasan internal di wilayah sebesar 37,44 dari target 3,12 sehingga capaian kinerja sebesar 12% dan untuk indeks pengamanan keimigrasian di wilayah mencapai 12% dari realisasi 37,44 dan target sebesar 3,12. Capaian kinerja divisi keimigrasi telah mencapai dan melebihi target pada perjanjian kinerja tahun 2022.

**4. DIVISI YANKUMHAM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	423.55	84.31
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	75.15	91.64
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	3 Layanan	11	3.7
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	53	53
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	165	165
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	9	4.5
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	9	9
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70	70



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1	100
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	83	103.75
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	14 Orang	14	100
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	1	50
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	72	88.90
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	84	105
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	72	93.98
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	60	85.71
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	60	300



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	5	2.5
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	11	11
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	2	200
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	10	3.33

ANALISIS

Realisasi capaian kinerja pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua diperoleh dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022, diantaranya :

1. Admnistrasi Hukum Umum

Pelantikan Notaris pengganti sebanyak 2 (dua) orang; Pelantikan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Jayapura periode 2022 – 2025 sebanyak 9 (sembilan) orang; kegiatan Sosialisasi pemahaman audit kepatuhan prinsip mengenali pengguna jasa; kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan untuk usaha Mikro kecil dan menengah; kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan; kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perorangan (PP); kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan; kegiatan Sosialisasi Layanan AHU tentang partai politik sebanyak 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan; kegiatan Sosialisasi Layanan

AHU tentang Legalisasi Apostille; Pelayanan Pendaftaran Perseroan Perorangan melalui Kantor Wilayah dan secara mandiri sebanyak 351 sertifikat yang terlaksana di Kota Jayapura dan beberapa Kabupaten.

2. Kekayaan Intelektual

Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas berdasarkan permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah sebanyak 3 (tiga) kali di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Asmat; Pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilayah sebanyak 1 kali, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilaksanakan Kantor Wilayah sebanyak 10 layanan; pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

a. Pendaftaran Hak Cipta sebanyak 808 pendaftar;

b. Pendaftaran Merek sebanyak 159 pendaftar;

c. Pendaftaran Paten Sederhana sebanyak 1 pendaftar;

d. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal sebanyak 3 pendaftar.

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI pada Saga Mall Abepura; MOU dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten sebanyak 26 MOU; MOU dengan Universitas sebanyak 6 MOU;

3. Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya 84 Pengharmonisasian dan Pemrakarsa Peraturan Perundang – Undangan (RAPERDA) dan 69 Rapergub DOB; Sebanyak 23 penandatanganan MoU dengan pemerintah dan sebanyak 13 MoU dengan DPR dan DPRD serta 7 MoU dengan universitas negeri dan swasta di Provinsi Papua.

4. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dari pihak OBH/LBH Papua Justice n Peace sebagai pihak ketiga dari Kanwil Kemennkumham Papua. Kegiatan Penyuluhan Hukum; Kegiatan Pembinaan/ pembentukan kelompok KADARKUM/DESA/KELURAHAN Sadar Hukum; Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah; Pengintegrasian Anggota JDIHN; Pengelolaan Perpustakaan

Hukum; Penandatanganan kontrak antara Kanwil KemenkumHAM Papua bersama OBH yang Lulus Verifikasi; penandatanganan Kontrak Addendum I Kolaborasi antara kanwil KemenkumHAM Papua bersama OBH; Pelatihanan PARALEGAL Angkatan I, II, III dan IV; Konseling, Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa serta Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara diluar Pengadilan oleh OBH.

5. DITJEN Hak Asasi Manusia

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak, Kabupaten Mimika; Kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang di ikuti oleh Kantor Wilayah, seluruh UPT PAS UPT Keimigrasian dan dihadiri secara Virtual Meeting oleh Dirjen HAM R.I, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM R.I beserta jajaran. Menghadirkan saksi dari pihak OMBUDSMAN dan Kejaksaan Tinggi Negeri Prov Papua; Kegiatan dan Laporan Rencana Aksi HAM (RANHAM) di Kab. Mimika, Kab. Keerom, Kab. Membramo Raya, Kab. Bouven Digoel, Kab. Jayawijaya dan Kab. Asmat melalui Website Kesekretariatan Presiden dan Aplikasi serambi.ksp.go.id; Kegiatan dan Laporan Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM) di Kota Jayapura beberapa Kab. yang berada di Papua; Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Mimika, Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Membramo tengah dan Kab.Lanny Jaya; Kegiatan FGD Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM terkait kampung Adat; Kerjasama antar Subbid Pemajuan HAM dan BPHN dalam melaksanakan Pelatihanan Penguatan PARALEGAL.

6. BALITBANGKUMHAM

Kegiatan Analisa Kebijakan dengan Pemanfaatan (SIPKUMHAM) yang terupdate pada Aplikasi SIPKUMHAM sebanyak 11 (sebelas) permasalahan; Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM (OPini) di

Wilayah; Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM.

Adapun beberapa kendala/tantangan yang menyebabkan beberapa target tidak tercapai atau terlaksana dikarenakan pemblokiran anggaran, pandemi covid-19 dan kekurangan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi Anggaran Keseluruhan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua akhir Tahun 2021 adalah 96,64% dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE NAMA SATKER	TOTAL (Rp)			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
1	408902 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN AHU)	1,859,150,000	1,834,065,745	98.65	25,084,255
2	408903 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN PAS)	1,240,098,000	1,228,569,047	99.07	11,528,953
3	408904 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN IMIGRASI)	2,356,106,000	2,238,695,077	95.02	117,410,923
4	408905 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN KI)	804,321,000	792,707,318	98.56	11,613,682
5	408906 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (SETJEN)	18,992,934,000	18,829,962,426	99.14	162,971,574
6	408907 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN PP)	275,000,000	274,544,000	99.83	456,000
7	408908 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (DITJEN HAM)	367,670,000	367,068,000	99.84	602,000
8	408909 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (BPHN)	584,721,000	564,929,630	96.62	19,791,370
9	408910 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA (BALITBANGHAM)	172,347,000	171,847,000	99.71	500,000

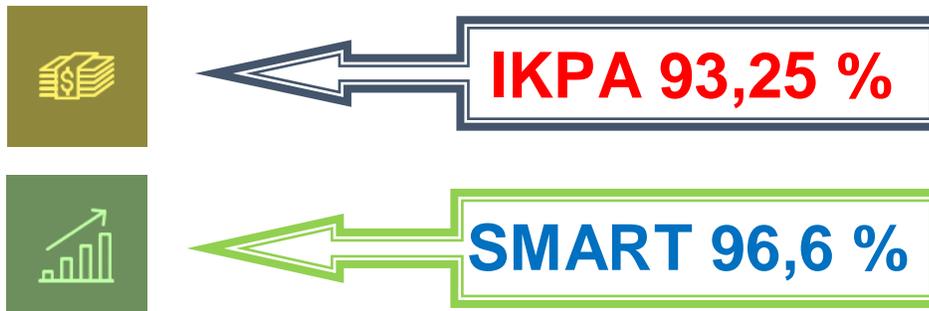


10	407794 LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	14,689,972,000	14,588,755,487	99.31	101,216,513
11	653051 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	12,910,937,000	12,728,382,115	98.59	182,554,885
12	407823 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	7,460,571,000	7,440,213,520	99.73	20,357,480
13	407839 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	6,249,486,000	6,241,672,274	99.87	7,813,726
14	407808 LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	7,311,067,000	7,156,733,735	97.89	154,333,265
15	407845 LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	10,507,883,000	10,462,250,175	99.57	45,632,825
16	407814 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	7,076,797,000	6,868,184,956	97.05	208,612,044
17	652873 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	7,770,827,000	7,586,111,306	97.62	184,715,694
18	352615 LPKA JAYAPURA PROVINSI PAPUA	4,988,549,000	4,617,720,201	92.57	370,828,799
19	418360 LAPAS PEREMPUAN KELAS III JAYAPURA	4,739,452,000	4,683,848,321	98.83	55,603,679
20	409233 LAPAS KELAS III TANAH MERAH	3,627,269,000	3,618,975,749	99.77	8,293,251
21	632751 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	2,337,680,000	2,270,171,695	97.11	67,508,305
22	109149 BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	3,963,112,000	3,649,922,081	92.10	313,189,919
23	653201 BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	2,390,469,000	2,187,583,460	91.51	202,885,540
24	408625 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEEROM	1,239,077,000	1,236,657,242	99.80	2,419,758
25	408253 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	17,884,363,000	15,596,915,747	87.21	2,287,447,253
26	109159 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	7,108,511,000	6,781,479,967	95.40	327,031,033
27	408262 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	7,720,184,000	7,413,257,622	96.02	306,926,378
28	408284 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	9,733,705,000	9,345,522,781	96.01	388,182,219
29	664701 RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	6,621,164,000	6,400,236,109	96.66	220,927,891
TOTAL PAGU PAPUA		172,983,422,000	167,176,982,786	96.64	5,806,439,214

Total pagu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dan Unit Pelaksana Teknis tahun 2022 sebesar **Rp 172,983,422,000,-** dan yang terserap sebesar **Rp 167,176,982,786,-** atau **96,64%**.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat diukur melalui 2 (dua) indikator lainnya, yaitu pada aplikasi SMART DJA dan IKPA. Untuk penilaian pada aplikasi SMART DJA Kantor Wilayah Papua berada pada posisi urutan 22 dari 34 Kantor Wilayah seluruh Indonesia. Dengan komponen penilaian SMART, Kanwil Papua memiliki nilai kinerja sebesar 96,6 dan penyerapan 99,14 selanjutnya konsistensi 99,93, CRO 100 dan efisiensi 15,38 serta nilai efisiensi 88,46. Nilai IKPA Kantor Wilayah Papua sebesar 93,25 dan berada pada posisi urutan 33 dari 34 Kantor Wilayah seluruh Indonesia, nilai IKPA ini tidak mencapai target dikarenakan keterlambat pertanggungjawaban serta pengelolaan anggaran yang kurang maksimal.



D. CAPAIAN LAINNYA

a) Aplikasi E-Perfomance

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua beserta jajarannya telah melaksanakan penginputan pada aplikasi E-Performance pada tahun 2022 dan membantu Kantor Wilayah Papua untuk memantau kinerja



untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

b) Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Pelaksanaan atrget Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kendala kekurangan data dukung yang diupload, berikut ini adalah nilai target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua,yaitu:

1. Divisi Administrasi

DATA DUKUNG TARGET KINERJA B01 TAHUN 2022														
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA														
NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	HASIL VERIFIKASI											KETERANGAN	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
DIVISI ADMINISTRASI														
1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	30%	Data dukung yang diunggah tidak terdapat laporan kegiatan serta daftar hadir. Kegiatan workshop yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Kanwil Papua
2	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	30%	data dukung yang diunggah bukan best practice
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Belum di verifikasi
4	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	0%	Belum di verifikasi
5	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100%	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	0%	-	0%	Belum di verifikasi
6	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	0%	Belum di verifikasi
7	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	0%	Belum di verifikasi
8	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Belum di verifikasi
9	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	0%	0%	Belum di verifikasi
10	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100%	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	0%	Belum di verifikasi
11	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	Belum di verifikasi



2. Divisi Yankum

DATA DUKUNG TARGET KINERJA B01 TAHUN 2022														
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA														
NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	HASIL VERIFIKASI												KETERANGAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM														
1	Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Desa/Kelurahan sadar hukum	-	60%	95%	100%	-	75%	100%	80%	80%	85%	39%	39%	Laporan tidak sesuai, karena data dukung yang dilampirkan belum mencakup data dukung keseluruhan kegiatan yang dilakukan di B07 - B11
4	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100%	51%	100%	84%	80%	76%	76%	100%	100%	76%	51%	76%	tidak ada laporan rekapitulasi hasil survei ipk-ikm bilan november satker (hanya melampirkan data hasil survei integritas)
5	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data dukung yang diupload berupa Dokumen Formulir Pengisian Pelaporan KKP HAM, namun daduk yang diupload formulir kosong
7	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data dukung sama dengan B02
8	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
9	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	
13	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	-	-	Ditolak
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



3. Divisi Pemasyarakatan

MONITORING TARGET KINERJA TAHUN 2022														
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA														
NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	HASIL VERIFIKASI												KETERANGAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
DIVISI PEMASYARAKATAN														
1	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	100%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	Output kurang tercapai, Dokumen harap dilengkapi dengan laporan kegiatan intelijen yang dibuat dan ditandatangani oleh Divisi pas sebagai output dari target kinerja
2	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	75%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	laporan harap disesuaikan dengan format yang telah disampaikan	
3	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300%	90%	80%	85%	90%	90%	100%	95%	95%	95%	90%	90%	Sistematika kurang sesuai dengan TNDE dan tidak memuat kesimpulan	
4	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kanwil tidak melampirkan surat keputusan ditjenpas tentang UPT target SPPT TI yang terbaru. dokumen surat keputusan ditjenpas masih tahun 2021	
5	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	90%	90%	100%	100%	100%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	Sudah bagus, pertahankan ya. Substansi dan pencapaian output yang dilaporkan tercapai, Laporan tepat waktu.	
6	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	100%	90%	90%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	100%	Isi dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa) sama persis dengan laporan pelatihan keterampilan bersertifikat (agribisnis, manufaktur dan jasa). Harusnya isinya terkait monitoring dan evaluasi.	
7	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	-	95%	95%	100%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	Data dan informasi kurang sesuai dengan target kinerja karena data yang dikirimkan adalah rekap SPPN B07 seharusnya rekap SPPN B08. Harap berikutnya perbaiki	
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh; 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri; 3. Palembang, Sumsel; 4. Yogyakarta, DIY; 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara; 6. Kupang, NTT; 7. Kota Gorontalo, Gorontalo; 8. Kota Palu, Sulteng; 9. Ternate, Maluku utara; 10. Kota Jayapura, Papua.	95%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Telah terpenuhi namun perlu ditambahkan dan dilengkapi dengan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan	
11	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasyarakatan	-	-	-	-	-	100%	95%	80%	95%	95%	95%	Laporan harap dilengkapi dengan analisa dari Divisi Pas	

4. Divisi Imigrasi

DATA DUKUNG TARGET KINERJA B01 TAHUN 2022														
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA														
NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	HASIL VERIFIKASI												KETERANGAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
DIVISI IMIGRASI														
1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	
2	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	0%	-	Ditolak
3	Implementasi Mobile Paspor	-	100%	-	-	95%	-	-	100%	-	-	100%	-	Kanim Merauke belum melampirkan laporan implementasi M-Paspor



c) E-Monev Bappenas

Berikut adalah hasil monitoring penginputan pada aplikasi e-Monev Bappenas selama tahun 2022 :

NO	NAMA SATKER	E- MONEV BAPPENAS																							
		KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO		
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGST		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
1	DITJEN AHU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	DITJEN PEMASYARAKATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	0%	80%	0%	
3	DITJEN KEIMIGRASIAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	DITJEN KI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	SEKJEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	DITJEN PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	50%	43%	0%	
7	DITJEN HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	89%	90%	0%	
9	BALITBANGKUMHAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Pada Unit Eselon I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua belum mencapai 100% penginput dikarenakan terjadi revisi, sehingga anggaran pada aplikasi belum sesuai dengan yang sudah di revisi.

NO	NAMA SATKER	E- MONEV BAPPENAS																							
		KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO	KOM	RO		
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
1	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	BAPAS KEEROM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

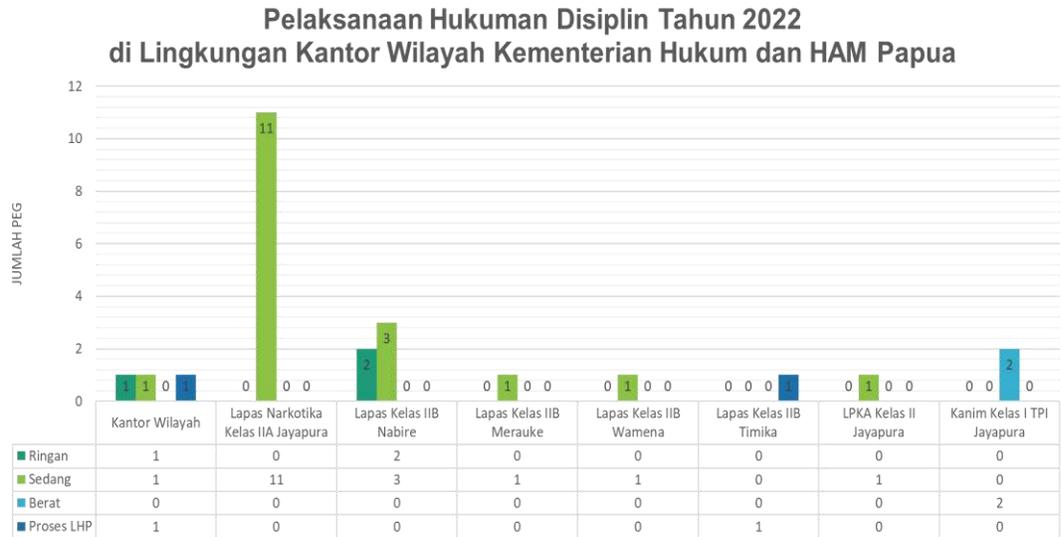
Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melaksanakan penginputan, namun salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak belum menginput mencapai 100% karena anggaran pada aplikasi e-Monev Bappenas tidak sesuai dengan yang telah direvisi, tetapi telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan file revisi untuk disesuaikan.



d) Kegiatan Prioritas Nasional

Berikut Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 :

1. Verifikasi Target Kinerja sebesar 100%;
2. Pelaksanaan Hukuman Disiplin sebanyak 24 Orang pegawai;



3. Pelaksanaan retoratif justice pada 3 (tiga) Bapas telah berjalan dengan baik;
4. 80% Narapidana mendapat pendidikan vokasi bersertifikat melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa);
5. Penerbitan paspor WNI sebanyak 7.621 dan pada Pos Lintas Batas sebanyak 300.



SEMAKIN PASTI



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulann Laporan Kinerja
Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Papua
Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka pertanggungjawaban yang berisi tentang perwujudan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua selama Tahun 2022 dalam upaya pelaksanaan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan kinerja tahun 2022 disusun dengan sistematika yang sedikit berbeda dengan tahun 2021 dan berpedoman pada dasar hukum KEPMENKUMHAM No. M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KEPMENKUMHAM No. M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021 – 2024.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan capaian – capaian kinerja selama tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, namun dalam proses pencapaian kinerja Kantor Wilayah Papua juga mengalami kendala ataupun tantangan sehingga ada beberapa tidak mencapai target kinerja. Adapun tantangan – tantangan itu yaitu kekurangan anggaran, SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pemblokiran anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai.

B. SARAN

Untuk dapat lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM diwilayah, beberapa masukan Kami sampaikan yaitu:

1. Sarana dan Prasana perlu ditingkatkan dengan cara penata usahaan BMN yang lebih baik;
2. Peningkatan kemampuan SDM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
3. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga penyerapan per triwulan sesuai dengan Disbursmenplan;
4. Alokasi dana bagi petugas imigrasi di pos lintas batas terpencil dan UPT yang memiliki biaya hidup jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Jayapura saat ini dirasakan sangat kurang;
5. Seluruh Satuan Kerja harus memiliki cctv dan sistemnya terpusat di Kantor Wilayah;
6. Untuk WBP perempuan dan anak yang terdapat pada unit pelaksana teknis agar dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Keerom dan LPKA Kelas II Jayapura;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini dibuat sebagai bahan laporan dan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya bagi kemajuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Antonius M. Ayorbaba, SH., M.Si
NIP. 19710515 199610 1 001





LAMPIRAN



LAMPIRAN





LAMPIRAN



LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70

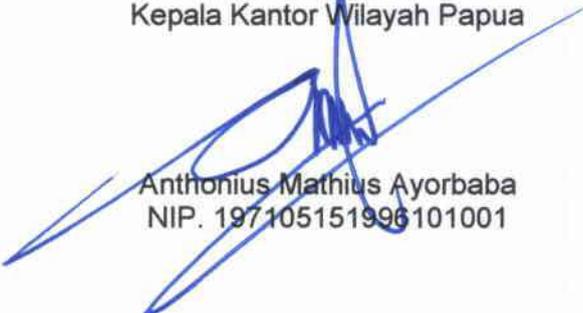
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	81

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.538.280.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.538.280.000,-

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan Papua


Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Lintang Hardiman
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 7 Maret 2022

Kepala Divisi Pemasyarakatan Papua

Endang Lintang Hardiman
NIP. 196706201993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagiling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthoni~~us~~ Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagiling
NIP. 198305022001121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

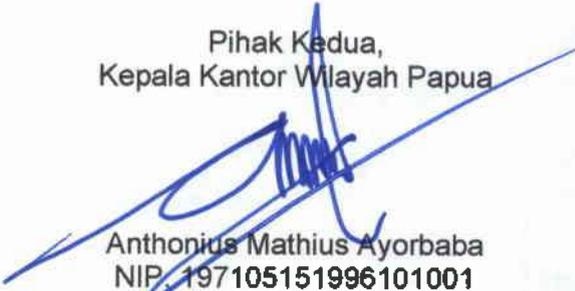
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.802.372.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 16.802.372.000,-

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Papua


Hendrik Pagiling
NIP. 198305022001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrik Pagling
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 7 Maret 2022

Kepala Divisi Administrasi Papua

Hendrik Pagling
NIP. 198305022001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Antthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Papua

Ian Fidihanto Markos
NIP. 196912111990031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.356.106.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.356.106.000,-

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua



Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Papua



Ian Fidiharto Markos
NIP. 196912111990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Fidihanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 7 Maret 2022

Kepala Divisi Keimigrasian Papua

Ian Fidihanto Markos
NIP. 196912111990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Antthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

Muhamad Mufid
NIP. 197603042005011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM PAPUA DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	86 %
2.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32
3.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %
4.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
5.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
6.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%
7.		Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

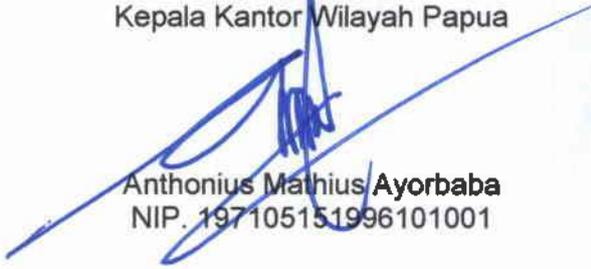
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	3 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	14 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	peraturan perundang-undangan		
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.147.278.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 1.859.150.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 804.321.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 483.807.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 419.876.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 285.000.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 134.876.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 367.670.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 367.670.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 234.768.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 234.768.000,-

Jayapura, 7 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua


Anthonius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua


Muhamad Mufid
NIP. 197603042005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Mufid

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 7 Maret 2022

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Papua

**Muhamad Mufid
NIP. 197603042005011001**

CAPTURE PELAKSANAAN PENGINTUPAN PADA APLIKASI E-PERFORMANCE TAHUN 2022 DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA



E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2022 DIVISI ADMINISTRASI PAPUA

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	TARGET				REALISASI		
						WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)			
3	Terejadinya layanan administratif dan faulatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien		1	Indeks kepuasan layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah		3 Indeks: Triwulan IV	TW1	3.1	Indeks	7.1	229	Januari: survey dilakukan terhadap 35 responden Februari: survey dilakukan terhadap 35 responden Maret: survey dilakukan terhadap 35 responden
						TW2	3.1	Indeks	11	355	April: survey dilakukan terhadap 35 responden Mei: survey dilakukan terhadap 48 responden Juni: survey dilakukan terhadap 35 responden	
						TW3	3.1	Indeks	7.4	239	Juli: Agustus: survey dilakukan terhadap 45 responden September: survey dilakukan terhadap 20 responden	
						TW4	3.1	Indeks	11	355	Oktober: survey dilakukan terhadap 14 responden November: survey dilakukan terhadap 22 responden Desember: survey dilakukan terhadap 22 responden	

Warna	Presentase	Keterangan
	0%	Tidak Ada Target
	< 100	Tidak Tercapai
	= 100	Tercapai
	> 100	Melebihi Target



CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2022 DIVISI PELAYANAN HUKUM PAPUA

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	TARGET				REALISASI		
						WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)			
1	Terevisi Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan		1	Indeks kualitas Perancang Undang-undangan		3 Peran: Triwulan IV	TW1	3	Persen	3	100	Januari: Telah dilakukan koordinasi Februari: Telah dilakukan koordinasi Maret: Telah dilakukan koordinasi dan harmonisasi
						TW2	3	Persen	3	100	April: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi Mei: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi Juni: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi	
						TW3	3	Persen	3	100	Juli: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi Agustus: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi September: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi	
						TW4	3	Persen	4	133	Oktober: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi November: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi Desember: Telah dilakukan koordinasi dan Harmonisasi	
2	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas		1	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai Dengan Perencanaan		30 Peran: Triwulan IV	TW1	18	Persen	18	100	Januari: Kegiatan Himpunan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Dalam Proses Pengharmonisasian, Pemertanapan dan Pembentukan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Daerah tahun 2021 Februari: Kegiatan Himpunan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Dalam Proses Pengharmonisasian, Pemertanapan dan Pembentukan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Daerah tahun 2021 Maret: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi
						TW2	18	Persen	18	100	April: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi Mei: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi Juni: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi	
						TW3	18	Persen	20	111	Juli: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi Agustus: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi September: Sudah Terdapat beberapa Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi	
						TW4	18	Persen	20	111	Oktober: Sudah Terdapat 77 Raperda dari Kabupaten yang telah selesai dan Harmonisasi November: Desember:	
			2	Jumlah Pengujian Kapasitas dan Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		14 Orang: Triwulan IV	TW1	0	Orang	0		Januari: Rencana Akan Dilaksanakan Pada Triwulan II Februari: Rencana Akan Dilaksanakan Pada Triwulan III Maret: Rencana Akan Dilaksanakan Pada Triwulan III
						TW2	0	Orang	15		April: Rencana Akan Dilaksanakan Pada Triwulan II Mei: Rencana Akan Dilaksanakan Pada Triwulan II Juni: Kegiatan Pembinaan Perancang Telah Dilaksanakan	



E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
 TAHUN : 2022
 DIVISI PEMASYARAKATAN PAPUA

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	TARGET					REALISASI	
						WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)		
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar		1	Persentase menurunya tahanan yang overstay		80% Triwulan IV	TW1	21	tk	35	167	Januari : Terlaksana Februari : Terlaksana Maret : Terlaksana
						TW2	21	tk	24	114	April : Terlaksana Mei : Terlaksana Juni : Terlaksana	
						TW3	21	tk	20	176	Juli : Terlaksana Agustus : Terlaksana September : Terlaksana	
						TW4	21	tk	7	33	Oktober : Terlaksana November : Desember :	
	Persentase Tahanan yang memecah Layanan Pemukiman Hukam		2	Persentase Tahanan yang memecah Fasilitas Sentensi Hukam		80% Triwulan IV	TW1	21	tk	21	100	Januari : Terlaksana Februari : Terlaksana Maret : Terlaksana
						TW2	21	tk	21	100	April : Terlaksana Mei : Terlaksana Juni : Terlaksana	
						TW3	21	tk	21	100	Juli : Terlaksana Agustus : Terlaksana September : Terlaksana	
						TW4	21	tk	7	33	Oktober : Terlaksana November : Desember :	
	Persentase Tahanan yang memecah Fasilitas Sentensi Hukam		3	Persentase Tahanan yang memecah Fasilitas Sentensi Hukam		80% Triwulan IV	TW1	21	tk	21	100	Januari : Terlaksana Februari : Terlaksana Maret : Terlaksana
						TW2	21	tk	21	100	April : Terlaksana Mei : Terlaksana Juni : Terlaksana	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
 TAHUN : 2022
 DIVISI IMIGRASI PAPUA

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	TARGET					REALISASI				
						WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)					
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.2 Indeks Triwulan IV	TW1	9.6	Indeks	10.7	111	Januari : IIM Februari : Indeks Pengamanan Keimigrasian Maret : IIM			
						TW2	9.6	Indeks	11.4	119	April : Mei : IIM Juni : IIM				
						TW3	9.6	Indeks	11.4	119	Juli : indeks Kepuasan Masyarakat Agustus : September :				
						TW4	9.6	Indeks	11.4	119	Oktober : November : Desember :				
				Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		2	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.12 Indeks Triwulan IV	TW1	9.36	Indeks	9.36	100	Januari : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Februari : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Maret : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
									TW2	9.36	Indeks	9.36	100	April : indeks kepuasan internal di wilayah Mei : indeks Kepuasan Internal di Wilayah Juni : indeks kepuasan internal di wilayah	
									TW3	9.36	Indeks	9.36	100	Juli : indeks Kepuasan internal di Wilayah Agustus : September :	
									TW4	9.36	Indeks	9.36	100	Oktober : November : Desember :	
				Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.12 Indeks Triwulan IV	TW1	9.36	Indeks	9.36	100	Januari : Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Februari : Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Maret : Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
									TW2	9.36	Indeks	9.36	100	April : indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Mei : indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Juni : indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	
									TW3	9.36	Indeks	9.36	100	Juli : indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Agustus : September :	
									TW4	9.36	Indeks	9.36	100	Oktober : November : Desember :	